ANTARA PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BERBIAYA RINGAN DAN GAGASAN PEMBATASAN PERKARA KASASI

Prianter Jaya Hairi¹

Abstract

The speedy administration of justice is one of the principle in Indonesian system of judicature, but eventhough all kinds of law regulation has been made to support, this principle still not implemented well yet. The research found that the time period which has been decide by highest court usually not be able to be realized, moreover when a case reach the highest court, it could almost ascertained that the time for resolving case will take long time. Case backlog in highest court is one of the factor why resolving cases being slow. Therefore, it's important to solve accumulating cases first, and restricting cases is a concept which being raise a lot to diminish the case backlog. The regulation for restricting cassation advisable be realized by improving not only revision to Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, but also another law regulations which related to the submission of cassation. By restricting cases regulation, so a lot of cases will be done in appellate court. With this situation, time period for resolving cases become shorter, and the cost to litigate automatically become cheaper. If all of this can be applied, so then the speedy administration of justice would be finally realized.

Key words: Restricting Cassation, The Speedy Administration of Justice.

A. Latar Belakang

“Justice delayed is justice denied”,² demikian ungkapan politisi Inggris William Gladstone untuk menggambarkan betapa pentingnya prinsip peradilan yang cepat. Proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut berarti sama saja dengan pengabaian terhadap keadilan itu sendiri.

¹ Calon Peneliti pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI Indonesia, Email: yanter_0610@yahoo.com

² Ungkapan “Keadilan ditunda adalah keadilan yang ditolak” telah menjadi seruan untuk reformasi hukum yang melihat pengadilan atau pemerintah sebagai bertindak terlalu lambat dalam menyelesaikan masalah hukum baik karena sistem yang terlalu kompleks atau terbebani, atau karena isu atau pihak yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan politik. http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_delayed_is_justice_denied, diakses tanggal 10 Mei 2011.

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia. Keberadaan asas ini telah ada sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kini sudah tidak berlaku lagi. Asas yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Pada intinya, maksud dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Namun dalam implementasinya, asas ini ternyata masih sulit. Banyak perkara diproses dalam waktu yang cukup lama dan tidak sederhana sama sekali disebabkan banyaknya tingkatan peradilan, dan biaya yang tidak dapat dikatakan ringan apalagi jika sampai ke pengadilan kasasi.

Banyak kasus yang dapat dijadikan contoh dalam konteks ini, sebuah kasus pada tahun 2007 mengenai perparkiran yang di putus MA misalnya, saat itu MA menghukum sebuah perusahaan penyedia jasa parkir (*Secure Parking*) untuk membayar ganti rugi seribu rupiah kepada David Tobing, seorang konsumen pengguna jasa perparkiran. Dalam kasus ini sang penggugat menunggu selama empat tahun sebelum akhirnya diputus oleh MA, bahkan yang lebih ironis adalah, biaya perkara yang harus dibayar adalah lima ratus kali lipat dari nilai ganti rugi.³ Kasus lainnya yaitu seperti yang diungkapkan oleh Mantan Ketua MA Bagir Manan, bahwa ia pernah memeriksa sengketa tentang dua buah cangkul, dimana para pihak harus menunggu hingga lima tahun sebelum akhirnya diputus oleh MA.⁴ Kasus tentang sengketa dua buah pohon mangga juga pernah sampai ke tingkat kasasi.⁵ Fenomena seperti ini kerap terjadi dan membawa kita pada kesimpulan bahwa peradilan memang masih tidak sederhana, tidak cepat, dan juga tidak murah sama sekali.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, asas ini tampak dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara baik perdata maupun pidana pada tingkat *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357K/Pdt/2005

⁴ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/08/09/brk,20040809-28,id.html>, diakses tanggal 10 Mei 2011

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022K/PDT/2006

Tinggi).⁶ Namun dalam kenyataannya, masih sering terjadi penyelesaian perkara yang melewati jangka waktu penyelesaian sebagaimana telah ditetapkan dalam SEMA tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam penyelesaian perkara di tingkat kasasi⁷, bahkan di tingkat kasasi penyelesaian perkara yang berlarut-larut menjadi suatu keniscayaan disebabkan masalah tumpukan perkara yang kini melanda MA.

Langkah penetapan waktu penyelesaian perkara memang signifikan, namun dalam konteks mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, hal tersebut menjadi kurang berarti jika tidak diikuti konsistensi pengadilan dalam menepati waktu penyelesaian perkara. Tumpukan perkara di MA menyebabkan para pihak yang berperkara terpaksa “mengantri” untuk dapat disidangkan. Oleh sebab itulah, agar penetapan waktu penyelesaian perkara tersebut dapat berjalan efektif dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah tumpukan perkara di MA.

Gambaran di atas mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta hubungannya dengan gagasan pembatasan perkara kasasi. Selain itu, penulis juga bermaksud mengkaji tentang perkara apa saja yang perlu dibatasi pengajuan kasasinya, dan bagaimana bentuk pengaturannya. Gagasan pembatasan perkara ini termasuk salah satu materi dalam perubahan ketiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Mahkamah Agung yang saat ini termasuk salah satu Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah berkenaan dengan:

1. Bagaimana implementasi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dan bagaimana pula kaitannya dengan gagasan pembatasan perkara kasasi?
2. Perkara apa saja yang perlu dibatasi pengajuan kasasinya? Dan bagaimana bentuk pengaturannya?

⁶ Terakhir, pengaturan mengenai percepatan penyelesaian perkara ini diatur kembali dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. Jangka waktu penyelesaian perkara di masing-masing tingkat pengadilan adalah 6 bulan.

⁷ Berdasarkan Surat Keputusan Ketua MA No.138/KMA/IX/2009 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI adalah satu tahun.

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, serta mengetahui tentang bagaimana hubungannya dengan gagasan pembatasan perkara kasasi.
2. Untuk mengetahui perkara apa saja yang perlu dibatasi pengajuan kasasinya dan bentuk pengaturannya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (*The Speedy Administration of Justice*)

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tersebut berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Sudikno Mertokusumo mengatakan, yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik, terlalu banyak formalitas-formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang bermakna ganda (*dubius*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan. Biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan.⁸

Asas peradilan cepat yang dianut KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas ini di dalam KUHAP cukup banyak diwujudkan dalam istilah “segera”. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang merupakan penjabaran asas peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*), diantaranya sebagai berikut:⁹

⁸ Sulistyono, Tesis: Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat Untuk Peradilan Tata Usaha Negara Studi Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007, hal. 14.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Garafika, 2009, hal. 13.

- a. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.
- b. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan, segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, dan segera diadili oleh pengadilan.
- c. Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- d. Pasal 106 mengatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
- e. Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- f. Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.
- g. Pasal 140 ayat (1) dikatakan, “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Pengaturan lainnya seperti pelimpahan perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, 14 hari dari tanggal permohonan banding (Pasal 236 KUHAP), 7 hari sesudah putus dari tingkat banding pengadilan tinggi harus mengembalikan berkas ke pengadilan negeri (Pasal 234 ayat (1)). Juga pada tingkat kasasi, 14 hari dari tanggal permohonan kasasi pengadilan negeri harus mengirimkan berkas perkara ke MA untuk diperiksa dalam tingkat kasasi (Pasal 248 KUHAP). Dan 7 hari sesudah tanggal putusan, MA harus sudah mengembalikan hasil putusan kasasi ke pengadilan negeri (Pasal 257). Asas peradilan yang sederhana dan biaya ringan juga dijabarkan dalam Pasal 98. Juga banding tidak dapat diminta terhadap putusan dalam acara cepat, pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang praperadilan.

Dalam rangka peningkatan percepatan penyelesaian perkara, Mahkamah Agung juga telah melakukan terobosan dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut ini Tahapan Batas Waktu Perkara yang diatur dalam Keputusan Ketua MA tersebut:

Tabel Tahapan Batas Waktu Perkara

Penelaahan Perkara	Jangka Waktu
Perkara pidana umum, khusus, militer yang terdakwa ditahan	3 hari
Perkara yang terdakwa tidak ditahan	2 minggu
Perdata umum, TUN, agama	2 minggu
Perdata khusus, TUN, pajak yang ditetapkan UU harus selesai 30 hari	2 hari
Kepaniteraan	
Registrasi perkara	2 hari
Penunjukan ketua tim oleh Ketua MA/Wakil Ketua jika terdakwa ditahan	3 Hari
Perkara pidana yang terdakwa tidak ditahan	2 Minggu
Perdata khusus, TUN, yang ditetapkan UU harus selesai 30 hari	2 Hari
Perdata umum, TUN, agama	2 Minggu
Pendistribusian ke Panitera Tim Majelis Hakim	3 Hari
Penetapan Majelis Hakim oleh ketua tim jika terdakwa ditahan	3 Hari
Penetapan Majelis Hakim oleh ketua tim jika terdakwa tidak ditahan	2 Minggu
Pemeriksaan Berkas oleh Hakim Agung	
Pemeriksaan berkas pidana khusus/umum jika terdakwa ditahan	disesuaikan dengan masa tahanan
Pemeriksaan berkas pidana khusus/umum jika terdakwa tidak ditahan masing-masing anggota majelis	1,5 bulan
Pemeriksaan terhadap berkas perdata khusus, TUN, yang ditetapkan UU harus selesai 30 hari	5 Hari
Pemeriksaan berkas perdata umum, TUN, agama masing-masing anggota majelis	2 Bulan
Penyelesaian Minutasi (Pengetikan) Perkara	
Penyerahan putusan asli dan minutasi perkara pidana jika terdakwa ditahan	2 Bulan
Minutasi perkara pidana jika terdakwa tidak ditahan	3 Bulan
Pengiriman berkas setelah selesai diminutasi untuk dikirim ke pengadilan pengaju	2 Bulan

Dalam pengelolaan biaya perkara, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. PERMA tersebut diantaranya mengatur bahwa “besarnya biaya kasasi perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan biaya perkara Kasasi perkara perdata niaga sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), sementara biaya perkara kasasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang nilai gugatan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Peradilan cepat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah pula diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, bunyi pasal tersebut yaitu (terjemah) “untuk diadili tanpa penundaan”. Kemudian Pasal 9 paragraf 3 kovenan yang sama juga mengatur bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya). Selengkapny pasal tersebut berbunyi, (terjemah) “setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian”.

1. Kasasi (*Cassatie*)

a. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas apa makna kasasi. Namun dari perumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 kita akan dapat menangkap makna dari kasasi ini. Bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan yang memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan, dan dalam tingkat kasasi berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Menurut Yahya Harahap, apa yang dikemukakan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 hampir sama dengan pengertian yang terdapat dalam Kamus Istilah Hukum, yaitu “*Cassatie*: Pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim rendah oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan persatuan peradilan”. Hal itu dilakukan MA apabila putusan itu melanggar bentuk yang diharuskan dengan ancaman batal, karena melanggar ketentuan hukum atau melampaui kekuasaan peradilan.¹⁰

Agar lebih memahami, mungkin lebih baik memperhatikan bagaimana sejarah terbentuknya lembaga kasasi itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting pula, bagaimana pendapat ahli hukum mengenai arti dari kasasi ini.

Upaya hukum kasasi (*cassatie*) merupakan lembaga hukum, dilahirkan di Perancis dengan istilah “*Cassation*” dan berasal dari kata kerja “*Casser*” yang berarti membatalkan atau memecahkan.¹¹ Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada ditangan raja beserta dewannya yang disebut *Conseil du Roi*. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Perancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum, jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman. Lembaga kasasi ini kemudian ditiru negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia.¹²

Jika dilihat dari sejarah kasasi yang pada awalnya adalah berfungsi menjaga kesatuan penafsiran hukum, maka kasasi tentulah bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga. Pada prinsipnya peradilan memang dilakukan dalam dua tingkat yaitu tingkat pertama oleh pengadilan negeri dan tingkat banding atau terakhir oleh pengadilan tinggi, dimana masalah-masalah fakta dan masalah-masalah hukum mendapat penelitian. Dalam tingkat kasasi lain lagi persoalannya. Putusan yang terhadapnya diajukan keberatan kasasi tidak dikaji secara keseluruhan. Fakta-fakta yang menjadi kewenangan *judex facti* untuk memeriksanya diterima sebagaimana adanya dalam pemeriksaan kasasi,

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 233.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007, hal. 259.

¹² Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 297.

tidak lagi mendapat penelitian. Pemeriksaan kasasi ditujukan kepada persoalan apakah *judex facti* sudah menerapkan hukum secara tepat.¹³

Kasasi pada dasarnya didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti melampaui kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit ialah D.Simons yang mengatakan jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan.¹⁴

Mengenai arti kasasi, mantan Ketua MA, Mr.Wirjono Projodikoro mengemukakan, “Kasasi yang berarti pembatalan adalah salah satu tindakan MA sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Dari kenyataan, bahwa kasasi dilakukan atas putusan-putusan tingkat tertinggi dari pengadilan pengadilan lain, dapat disimpulkan bahwa peradilan kasasi tidak boleh dinamakan peradilan tingkat ketiga”.¹⁵

Selanjutnya mengenai tujuan kasasi, Prof. Seno Adji menyatakan: “Kasasi ditujukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Ia (kasasi) bertujuan untuk menciptakan suatu kesatuan hukum di samping hendak menjamin kesamaan dalam peradilan”.¹⁶ Dengan demikian peradilan kasasi memang dilakukan demi kepastian dan kesatuan hukum. Membina kesatuan hukum tetap menjadi tujuan hukum utama kasasi, meskipun bukan satu-satunya.

Pada KUHAP, upaya hukum kasasi diatur dalam Bab XVII Bagian Kedua, Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Selanjutnya substansi pemeriksaan kasasi disebutkan pembentuk undang-undang hanya “terhadap putusan-putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung” atau “terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Mengenai fungsi kasasi, Yahya Harahap menuturkan, jika ditinjau dari segi teori dan praktik, maka ada beberapa fungsi pokok yang diperankan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi, antara lain:¹⁷

¹³ Soedirjo, *Kasasi dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hal. 24.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 297.

¹⁵ Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 4.

¹⁶ *Ibid*, hal. 5.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, *Op. cit.*, hal. 237.

- a. Mengoreksi kesalahan peradilan bawahan;
- b. Berfungsi menghindari kesewenangan;
- c. Menyelesaikan kontroversi ke arah standar prinsip keadilan umum yang objektif dan uniformitas;
- d. Membantu ketersediaan sumber hukum yang bersifat hukum kasus (*Case Law*).

b. Alasan Permohonan Kasasi dan Putusan yang Dapat atau Tidak Dapat Dikasasi.

Salah satu syarat mutlak permohonan kasasi menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah pemohon wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi, tanpa memori kasasi ini permohonan tidak dapat diterima. Adapun alasan-alasan kasasi adalah sebagaimana yang telah disebutkan tadi dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

Alasan permohonan kasasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut dapat dikatakan sama dengan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Landasan hukum mengenai putusan yang dapat dikasasi diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 29 berbunyi: “Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan”. Sementara Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

Selain putusan yang dapat dikasasi, suatu permohonan kasasi juga dapat ditolak untuk diperiksa oleh MA. Menurut KUHAP, suatu permohonan ditolak jika:¹⁸

¹⁸ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hal. 299.

- a. Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Senada dengan ini putusan MA tanggal 19 September 1956 No.70/Kr/1956, mengenai putusan bebas tidak murni, yaitu bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum, termasuk bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung tertutup kemungkinan mengajukan banding, tetapi dapat diajukan kasasi;
- b. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 245 KUHAP). Senada dengan itu putusan MA tanggal 12 September 1974 No.521/K/Kr/1975;
- c. Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut, kasasi hanya dilakukan sekali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP);
- d. Pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP), atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP);
- e. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP tersebut, juga perlu ditinjau yurisprudensi MA yang berkaitan dengan penolakan kasasi seperti:¹⁹

- a. Permohonan diajukan oleh seorang kuasa tanpa kuasa khusus (putusan MA tanggal 11 September 1958 No.117 K/Kr/1958);
- b. Permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan akhir pengadilan tinggi (putusan MA tanggal 17 Mei 1958 No.66 K /Kr/1958);
- c. Permohonan kasasi terhadap putusan sela (putusan MA tanggal 25 Februari 1958 No. 320 K?Kr/1957);
- d. Permohonan kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh pejabat berwenang (putusan MA tanggal 5 Desember 1961 No. 137 K/Kr/1961).

c. Pembatasan Kasasi.

Pembatasan kasasi berpedoman pada ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Bunyi dari pasal tersebut adalah:

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.

¹⁹ *Ibid*, hal. 300.

2. Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. putusan tentang praperadilan;
 - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
3. Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.
4. Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Setidaknya ada dua model pembatasan perkara, yaitu pembatasan secara kualitatif dan kuantitatif. Pembatasan secara kuantitatif maksudnya, penentuan suatu perkara bisa dikasasi atau tidak dapat diukur kuantitasnya, misalnya berdasarkan nilai perkara (untuk perkara perdata dan agama), berat ringannya ancaman hukuman atau hukumannya (untuk kasus pidana) atau jenis perkara tertentu (baik pidana, perdata, dan agama). Asumsinya biasanya karena perkara-perkara demikian bukanlah perkara yang sulit. Kelemahan pembatasan model ini adalah karena nilai antara satu perkara dengan perkara lain bisa jadi sangat berbeda. Pembatasan secara kualitatif maksudnya, penentuan suatu perkara untuk dapat dikasasi atau tidak tergantung “kualitas” perkaranya. Misalnya, perkara hanya bisa dikasasi jika perkara tersebut memiliki dampak luas terhadap para pihak atau masyarakat, memiliki dimensi konstitusional dan sebagainya. Kelemahan utama model ini adalah penentuan apa perkara yang dianggap layak (karena “berkualitas”) bisa jadi sangat subyektif dan berpotensi disalahgunakan.²⁰

²⁰ Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Tahun 2003, hal. 188-189.

E. Analisis

Implementasi Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Hubungannya Dengan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi

“*The Speedy Administration of Justice*” sebenarnya telah dijamin dalam hukum positif. Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Namun ironisnya di tataran implementasi asas ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.²¹

Dalam tataran teknis pelaksanaan, asas ini hadir dalam KUHAP yang sebagian besar mengatur tentang proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga jangka waktu pelimpahan perkara.²² Namun pengaturan dalam KUHAP itu ternyata juga tidak menjamin tegaknya asas ini. Aturan dalam KUHAP yang terkait dengan asas ini banyak tertuang dalam kata-kata “segera” yang mana tidak memberikan kepastian yang jelas. Memang tidak semuanya demikian, beberapa pasal memang menetapkan waktu yang jelas,²³ namun satu hal yang signifikan adalah bahwa KUHAP sama sekali tidak mengatur jangka waktu penyelesaian perkara di pengadilan.

Masalah ini kemudian coba diatasi dengan MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. SEMA ini sebenarnya adalah SEMA ke-lima yang mengatur masalah ini, SEMA Nomor 3 Tahun 1998 diterbitkan oleh karena surat edaran sebelumnya ternyata belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, diantaranya:

- a. SEMA Nomor 1 Tahun 1962 tentang Cara Penyelesaian Perkara;
- b. SEMA Nomor 4 Tahun 1962 tentang Penyelesaian Perkara;

²¹ Dalam sebuah survey, mayoritas responden (69%) yang pernah menggunakan pengadilan merasa kecewa (tidak puas) karena menganggap proses peradilan terlalu lama untuk menyelesaikan sengketa yang mereka alami. *The Asia Foundation, Survey Report on Citizens Perceptions of the Indonesia Justice Sector: Preliminary Findings and Recommendations*, 2001, hal. 78. Baca juga dalam *Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)*, 2010.

²² Lihat dalam kerangka pemikiran tentang Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

²³ Beberapa pasal dalam KUHAP yang menetapkan jangka waktu proses, misalnya: pelimpahan perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, 14 hari dari tanggal permohonan banding (Pasal 236 KUHAP), 7 hari sesudah putus dari tingkat banding pengadilan tinggi harus mengembalikan berkas ke pengadilan negeri (Pasal 234 ayat (1)). Juga pada tingkat kasasi, 14 hari dari tanggal permohonan kasasi pengadilan negeri harus mengirimkan berkas perkara ke MA untuk diperiksa dalam tingkat kasasi (Pasal 248 KUHAP). Dan 7 hari sesudah tanggal putusan, MA harus sudah mengembalikan hasil putusan kasasi ke pengadilan negeri (Pasal 257).

- c. SEMA Nomor 2 Tahun 1963 tentang Penyelesaian Perkara;
- d. SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara memberi petunjuk mengenai waktu penyelesaian perkara dapat cepat, dengan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi agar penyelesaian perkara dapat cepat yaitu ditingkat pertama selama enam bulan, dan ditingkat banding selama enam bulan, sehingga perkara akan selesai di dua tingkat maksimum dua belas bulan. Selain itu, perkara yang dimohonkan banding atau kasasi harus sudah dikirm kepada Ketua Pengadilan Tinggi (untuk tingkat banding) dan kepada Ketua Mahkamah Agung (untuk tingkat kasasi) dalam waktu tiga puluh hari.

Selanjutnya mengenai pengaturan jangka waktu penyelesaian perkara kasasi, diatur dalam Surat Keputusan Ketua MA No.138/KMA/IX/2009 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI. Melalui Surat Keputusan ini, maka perkara-perkara yang ditangani MA harus diputuskan dalam waktu satu tahun. Surat Keputusan ini pula memberikan penekanan penyelesaian proses berperkara di Mahkamah Agung bukan saja kepada administrator yudisial yaitu Kepaniteraan Mahkamah Agung, namun juga memberikan batasan waktu kepada Hakim Agung yang menangani perkara.²⁴

Berbagai pengaturan dalam SEMA tersebut pada akhirnya ternyata tidak menyelesaikan masalah. Proses peradilan di pengadilan tingkat pertama dapat mencapai waktu 6 bulan, pengadilan tingkat banding 6 bulan, namun ketika sampai di tingkat kasasi rata-rata kurang dari 3 tahun dan ada pula pihak berperkara yang harus menunggu hingga 6 – 8 tahun bahkan lebih.²⁵ Mengenai hal ini, Mantan hakim agung Yahya Harahap mengatakan, “waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara dari tingkat pertama sampai kasasi adalah tujuh hingga dua belas tahun, dan waktu terlama ada pada proses pemeriksaan di MA”²⁶.

Ketidak berdayaan MA menyelesaikan perkara pada waktunya tersebut menyebabkan penumpukan perkara di MA.²⁷ Masalah penumpukan ini memang diakui bukanlah hal yang baru, melainkan telah terjadi sejak lama. Keadaan tersebut diperparah dengan perkembangan hukum acara yaitu

²⁴ Pada tahun 2009 saja, sebanyak 8835 perkara menunggak di MA.

²⁵ Rifqi Sjarief Assegaf *at all*, *Op. cit.*, hal. 23.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 154.

²⁷ Pada tahun 2009, sebanyak 8835 perkara menunggak di MA.

semakin banyaknya putusan-putusan berbagai jenis pengadilan yang ada saat ini, seperti pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, dan lain-lain.

Problem tumpukan perkara inilah yang menjadikan asas peradilannya sederhana cepat dan murah belum juga terimplementasi dengan benar. Sebagian kalangan mulai dari akademisi hingga praktisi melihat problem tumpukan perkara di MA disebabkan tidak adanya aturan pembatasan perkara. Satu gagasan yang muncul untuk mengatasi hal tersebut adalah pembatasan perkara kasasi.

Memang harus diakui bahwa tidak adanya pembatasan perkara bukanlah satu-satunya penyebab tumpukan perkara di MA, kurangnya jumlah hakim agung, manajemen perkara yang lemah, kinerja hakim agung yang rendah dan lain-lain juga menjadi penyebab tumpukan perkara. Namun dari survei yang dilakukan terhadap pimpinan dan hakim agung mengenai hal ini dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Tahun 2003, didapati bahwa sebanyak 80% responden menganggap penyebab utama tumpukan perkara adalah ketiadaan pengaturan mengenai pembatasan perkara, sedang 70% lainnya menyatakan penyebab utamanya adalah kurangnya jumlah hakim agung.²⁸

Ide penambahan hakim agung kurang disetujui oleh banyak kalangan, sebab akan menimbulkan masalah baru yaitu akan membengkaknya organisasi, pegawai dan kebutuhan anggaran MA, sulitnya pengawasan terhadap Hakim Agung dan pegawai, menurunnya wibawa jabatan Hakim Agung atau banyaknya perbedaan antar majelis dalam memutus perkara sejenis. Selain itu terbukti bahwa penambahan Hakim Agung tidak menyelesaikan masalah.²⁹ Sebaliknya gagasan pembatasan perkara malah dianggap penting untuk mengantisipasi peningkatan arus perkara yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Dari studi yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dikatakan bahwa “jika MA secara serius melakukan perbaikan untuk menjawab masalah sistemik dan kultural, inkonsistensi putusan MA, kualitas dan kinerja hakim agung serta manajemen perkara, problem tumpukan perkara di MA saat ini dapat diselesaikan dengan relatif mudah. Namun hal tersebut tidak berarti pengaturan mengenai pembatasan perkara yang lebih efektif tidak diperlukan. Setidaknya ada empat alasan utama mengapa hal tersebut tetap diperlukan:³⁰

²⁸ Rifqi Sjarief Assegaf *at all*, hal. 9.

²⁹ Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Pembatasan Kasasi, Mahkamah Agung RI 2004, hlm 32. Baca juga: Luhut M.P Pangaribuan, Pembatasan Perkara Kasasi Dalam Rangka Menjaga Kesatuan Hukum: Satu Catatan Hukum Dalam Prospekti: Makalah disampaikan pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan *Netherland Legal Reform Program (NLRP)* di Jakarta 20 Juli 2010.

³⁰ Rifqi Sjarief Assegaf *at all*, *Op. cit.*, hal. 21.

- a. agar MA dapat lebih fokus untuk menjalankan fungsinya sebagai pengadilan kasasi;
- b. untuk memastikan peradilan yang cepat dan murah;
- c. mengurangi jumlah hakim;
- d. mengantisipasi peningkatan jumlah perkara ke depan”.

Dari sisi kemanfaatan, pembatasan perkara ini menjadi sangat signifikan. Mengapa kasus-kasus dengan nilai gugatan kecil dan perkara pidana yang relatif ringan harus menunggu kepastian hukum hingga begitu lama. Lamanya waktu penyelesaian perkara tentu akan mempengaruhi nilai uang atau nilai barang. Dengan kata lain jika dihitung secara ekonomis, proses hukum formal yang memakan waktu lama pasti merugikan. Kasus pohon mangga misalnya, apa yang terjadi setelah lima tahun kemudian? Ini semua justru menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tertentu. Mengapa perkara ringan di bawa hingga tingkat kasasi? Penelitian oleh Leip mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang melatarbelakanginya, salah satunya yaitu faktor niat negatif (memperlama eksekusi atau penyelesaian hukum), faktor ini pulalah yang kerap menjadikan orang “malas” membawa kasusnya ke pengadilan.³¹

Pembahasan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa pengaturan dalam hukum positif yang ada sekarang sebenarnya cukup menjamin asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, namun sayangnya tidak terimplementasi dengan baik, bahkan semakin terhambat dengan masalah tumpukan perkara di MA. Gagasan pembatasan perkara kasasi muncul untuk mengatasi permasalahan tumpukan perkara di MA, yang merupakan salah satu faktor penyebab belum terimplementasinya asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Gagasan pembatasan perkara juga menawarkan solusi penyelesaian perkara dengan lebih proporsional. Proporsional di sini artinya perkara yang relatif ringan akan lebih cepat mendapatkan kepastian hukum dan dapat mencegah orang-orang tidak bertanggung jawab untuk memperlama proses penegakan hukum.

Perkara Yang Perlu Dibatasi Pengajuan Kasasinya dan Bentuk Pengaturannya.

Dari penelusuran yang dilakukan, saat ini sebenarnya sudah ada pembatasan perkara kasasi yaitu diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, namun belum sempurna, sehingga kedepannya perlu diperkuat atau lebih diperketat lagi syarat permohonan kasasi. Inti dari Pasal 45A yaitu:

³¹ *Ibid*, hal. 24. Faktor lainnya yaitu faktor psikologis (ego pihak berperkara), dan juga faktor karena tidak adanya mekanisme lain untuk menjadi pilihan menyelesaikan perkara.

- a. Kasasi dibatasi pada perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi. Salah satu syarat pokoknya adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan). Dan juga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding).
- b. Kasasi tidak dapat diajukan atas perkara-perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu:
 1. putusan tentang praperadilan;
 2. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 3. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Dikatakan belum sempurna sebab pembatasan yang ada saat ini tidak menemui sasaran. Hal ini diutarakan oleh Yahya Harahap, ia mengatakan “ide dan motivasi pembatasan perkara kasasi yang ada dalam Penjelasan Umum alinea keempat³² jika dikaitkan dengan perkara-perkara yang dibatasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU MA tidak memenuhi sasaran bahkan boleh dikatakan naif dan absurditas, dengan alasan:

- a. Perkara yang dibatasi lebih cenderung pada perkara Pidana ditambah perkara Tata Usaha Negara.
- b. Jumlah perkara kasasi yang menumpuk sejak dahulu sampai sekarang adalah perkara yang menyangkut bidang perkara perdata, oleh karena memang ruang lingkungannya sangat luas.³³

Pernyataan di atas memang cukup beralasan, sebab perkara perdata umum memang selalu menjadi yang terbanyak diantara perkara-perkara lainnya yang masuk ke tingkat kasasi.³⁴ Oleh sebab itulah, maka Yahya Harahap menggagaskan

³² Isi Penjelasan Umum UU alinea keempat UU MA yaitu bahwa “Pembatasan ini di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat”.

³³ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Op. cit., hal. 253.

³⁴ Dari data statistik terlihat bahwa dalam waktu lima tahun terakhir, jenis perkara perdata umum selalu menjadi jenis perkara yang terbanyak masuk ke MA. Data terakhir, pada Juni 2010 sebanyak 2.276 perkara perdata umum masuk ke tingkat kasasi, dan itu merupakan jumlah yang terbanyak diantara perkara jenis lain. Lihat di: Suhadi, *Bahan Presentasi: Pembatasan Upaya Hukum untuk Menjaga Kesatuan Hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta, 2010.

bahwa secara objektif yang seharusnya menjadi sasaran pembatasan adalah perkara perdata.³⁵ Pengamat hukum Bambang Widjojanto serta akademisi Universitas Airlangga Philipus M.Hadjon juga sependapat mengenai hal ini, bahwa kasus-kasus perdata yang sederhana tak perlu dibawa ke MA sehingga proses prinsip peradilan yang cepat dan murah dapat terwujud.³⁶

Namun meskipun para ahli tersebut cenderung menyoroti pembatasan perkara kasasi perdata, itu tidaklah dimaksudkan bahwa pembatasan perkara bidang lainnya tidak signifikan. Pembatasan perkara kasasi bagi jenis perkara lain juga sangat diperlukan.

Dalam pembahasan mengenai perkara-perkara yang perlu dibatasi kasasinya, penulis akan melandaskan pada tiga sisi pemikiran, *pertama* pemikiran Yahya Harahap terkait pembatasan perkara perdata, *kedua* hasil riset Leip, dan *ketiga* rekomendasi dalam Cetak Biru MA tahun 2003 yang disusun oleh *The Asia Foundation* dan USAID, Leip, serta Tim Penyusun dari MA sendiri.

Hasil penelitian oleh Leip menunjukkan setidaknya ada 4 jenis perkara yang butuh pengaturan pembatasan kasasi, yaitu perkara perdata, pidana ringan, perkara bidang hukum keluarga dan waris, dan perkara bidang hubungan industrial.³⁷ Keempat bidang yang dimaksud akan dipaparkan satu-persatu di bawah ini:

Perkara Kasasi Perdata. Perkara kasasi perdata memang mendapat perhatian khusus, sebab sebagian perkara kasasi perdata merupakan perkara dengan nilai ekonomis kecil, seperti sengketa cangkul, sepetak tanah, pohon mangga, sengketa biaya parkir dan lain-lain. Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa (hingga tingkat kasasi), kerap tidak sebanding dengan nilai perkara yang disengketakan itu. Lihat saja bagaimana sengketa dua buah cangkul harus menunggu selama lima tahun baru mendapat kepastian hukum (hingga kasasi). Hitungan ekonomis dari sengketa senilai sepuluh juta rupiah tentu juga akan menimbulkan kerugian jika perkara tersebut baru mendapat kepastian hukum lima atau sepuluh tahun kemudian.

Selain itu, sering kali terjadi upaya hukum kasasi perdata dipergunakan oleh para pihak hanya untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Perilaku ini menyebabkan membengkaknya biaya berperkara, baik biaya beracara maupun biaya sewa advokat. Hal ini membuka kemungkinan biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada nilai perkara yang disengketakan. Ini sedikit banyak akan mempengaruhi orang untuk malas menyelesaikan perkara melalui

³⁵ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Op. cit., hal. 253.

³⁶ Rifqi Sjarief Assegaf *at all*, Op. cit., hal. 24,

³⁷ *Ibid*, hal. 42-47.

pengadilan. Maka dari itu, perlu pengaturan pembatasan bagi perkara kasasi perdata dengan nilai ekonomi kecil, dengan kata lain cukup selesai di tingkat banding. Penelitian oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menemukan bahwa negara-negara besar seperti Jerman, Jepang, dan Belanda telah berlakukan aturan seperti ini.³⁸

Mengenai perkara perdata yang dibatasi permohonan kasasinya, penulis sepakat dengan gagasan yang disampaikan oleh Yahya Harahap, bahwa yang dibatasi adalah perkara perdata yang tuntutananya kecil yang disebut “*Small Claim*” atau “Perkara Kecil”, dengan acuan penerapan sebagai berikut:³⁹

1. Jenis perkara diklasifikasi berdasarkan kualitas
 - a. Jenis perkara perdata biasa;
 - b. Jenis perkara perdata kecil (*small claim*).Jadi, khususnya perkara perdata yang menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) diklasifikasi berdasarkan kualitas yang terdiri dari perkara perdata biasa dengan perkara kecil. Patokan menentukan suatu perkara termasuk perkara biasa atau kecil:
 - Didasarkan pada nilai gugatan;
 - Ditentukan batasan nilai tertentu (misalnya Rp.100.000.000,00 ke bawah), gugatan yang nilainya di bawah itu digolongkan perkara kecil;
 - Di luar batas itu, termasuk perkara perdata biasa.
2. Upaya hukum terhadap masing-masing kelompok
 - a. Terhadap perkara perdata biasa, tetap terbuka upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung;
 - b. Sebaliknya, terhadap perkara kecil didesain upaya hukumnya: cukup satu instansi sampai upaya banding ke Pengadilan Tinggi, dan terhadapnya tertutup upaya hukum Kasasi.

Perkara Kasasi Bidang Hukum Keluarga dan Waris. Perkara jenis ini pada umumnya bersifat urgen sehingga memerlukan penyelesaian yang cepat. Selain untuk menjamin kepastian hukum, tapi juga untuk menghindari konflik keluarga. Dalam Cetak Biru Pembaruan MA Tahun 2003 usulan untuk membuat perkara cerai berakhir di tingkat Banding sebenarnya juga telah direkomendasikan, namun usulan ini tidak masuk dalam pembatasan perkara yang ada dalam pasal 45A UU No 5 Tahun 2004. Penelitian oleh LeIP juga mengungkap bahwa kasasi atas perkara perkawinan berpotensi menimbulkan eksekusi negatif seperti berlarut-larutnya perselisihan antar pasangan yang akan

³⁸ Dian Rosita, *Pentingkah Pembatasan Perkara*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2010, hal. 3.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Op. cit., hal. 254.

bercerai, ketidakjelasan hak anak, hingga disalahgunakannya kasasi untuk menghalangi pasangannya untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah kembali.⁴⁰ Oleh sebab itu, perkara kasasi jenis ini juga seharusnya diselesaikan pada tingkat Banding. Demikian juga dalam perkara-perkara adat untuk lingkup hukum keluarga seharusnya dapat diselesaikan pada tingkat banding.

Selanjutnya *Perkara Kasasi Hubungan Industrial*. Perkara sengketa hubungan industrial merupakan perkara yang tidak mengenal upaya hukum banding, namun dapat diajukan ke tingkat kasasi, hal ini diatur dalam UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tujuan pengaturan seperti itu adalah agar perkara yang menyangkut nasib buruh dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Lihat saja bagaimana tenggat waktu penyelesaian yang ditetapkan oleh UU yaitu paling lambat 30 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan! Namun apa yang terjadi? Penelitian oleh LeIP menemukan bahwa mayoritas putusan PHI, yakni sekitar 63% dimintakan kasasi dan PK. Jumlah yang sebesar itu membawa dampak tidak berdayanya MA memenuhi tenggat waktu penyelesaian. Yang terjadi adalah penyelesaian perkara kasasi PHI sejak pertama didaftarkan hingga putus memakan waktu kurang lebih delapan bulan.

Di tingkat Kasasi, jumlah hakim *ad hoc* PHI pada MA sangat terbatas yaitu berjumlah 6 orang yang membentuk tiga Majelis dengan keberadaan hakim agung non *ad hoc*.⁴¹ Susunan majelisnya, dua dari tiga hakim perkara ini merupakan hakim *ad hoc* dari masing-masing pihak (buruh dan pengusaha). Susunan Majelis seperti ini lebih mendekati konsep Arbitrase dibanding pengadilan Kasasi, padahal MA adalah pengadilan Kasasi yang berfungsi menjaga kesatuan hukum.

Dengan masalah seperti ini, maka perlu dipikirkan kembali, apakah jenis perkara PHI ini harus menggunakan upaya hukum kasasi atau cukup selesai di tingkat banding. Untuk meluruskan ini, perlu revisi UU No.2 Tahun 2004. Pengaturan pembatasan ini tentu akan mengurangi arus perkara kasasi dan akan mempercepat waktu penyelesaian sengketa PHI.

Terakhir, *Perkara Kasasi Pidana*. Ada dua bagian yang mendapat sorotan dalam pembatasan perkara kasasi pidana. Bagian pertama mengenai larangan kasasi atas putusan bebas, dan bagian kedua mengenai pembatasan kasasi bagi perkara pidana ringan (ancaman hukumannya ringan) termasuk pula ancaman pidana denda atau pelanggaran.

⁴⁰ Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Konsep Ideal Peradilan Indonesia, Jakarta: LeIP dengan dukungan National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hal. 23.

⁴¹ Dalam setiap perkara Sengketa Hubungan Industrial setiap Majelis terdiri dari 1 hakim *ad hoc* dari perwakilan serikat buruh, 1 hakim *ad hoc* dari perwakilan pengusaha, dan 1 hakim agung.

Dalam KUHAP, diatur bahwa putusan yang bersifat pembebasan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Namun dalam kenyataannya perkara bebas banyak diajukan kasasi. Keadaan ini terjadi sejak putusan Natalegawa pada tahun 1983 yang kemudian menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi tersebut mengatur bahwa yang tidak dapat dikasasi adalah bebas murni, sementara putusan yang bersifat bebas tidak murni tetap dapat dimintakan kasasi. Masalahnya adalah, penentuan putusan itu bebas murni atau bebas tidak murni baru dapat diketahui ketika putusan itu diajukan ke kasasi. Ini berarti pembatasan yang diatur KUHAP tidak ada artinya lagi. Dengan fakta bahwa putusan bebas di tingkat Pengadilan Negeri cukup banyak, maka dapat dibayangkan besarnya arus perkara putusan bebas ke MA. Dengan pertimbangan bahwa putusan bebas oleh pengadilan Negeri juga belum tentu benar, maka untuk memperbaiki keadaan ini, perlu dilakukan revisi terhadap pengaturan dalam KUHAP, agar putusan yang bersifat membebaskan dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum banding, namun sekali lagi, putusan bebas tidak dapat diajukan ke tingkat kasasi.

Pembatasan upaya hukum bagi tindak pidana ringan juga perlu diperkuat pengaturannya. Perkara yang akan ditentukan berakhir di tingkat banding dapat didasarkan pada ukuran ancaman hukuman. Untuk pidana dengan ancaman hukuman denda atau pelanggaran dapat dipertimbangkan untuk tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Namun masalahnya sekarang jarang sekali hakim memberikan hukuman denda, sebab ancaman hukuman denda dalam KUHP sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pidana denda, terlebih dahulu perlu dilakukan penyesuaian kembali nilai rupiah denda. Apabila banyak terdakwa yang dijatuhi pidana denda, maka kemungkinan besar terdakwa menjadi enggan mengajukan banding dan kasasi, dan hal ini tentu berdampak pada percepatan penyelesaian perkara.

Dalam Cetak Biru MA tahun 2003 juga direkomendasikan tiga alternatif atau model pendekatan pembatasan perkara kasasi:⁴²

1. Alternatif 1: pembatasan perkara kasasi yang perlu diatur hanyalah pembatasan perkara yang pengajuannya tidak memenuhi syarat formal kasasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 tahun 2001, karena itu, materi PERMA tersebut perlu dikuatkan dengan Undang-Undang.
2. Alternatif 2: perlu dibuat aturan mengenai pembatasan perkara kasasi dengan model pendekatan kuantitatif dimana pengaturan pembatasan perkara tersebut standarnya dibuat serendah mungkin, yaitu hanya bagi perkara sebagai berikut:

⁴² Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Tahun 2003, hal. 189-190.

- Perkara pidana yang ancaman hukumannya kurang dari satu atau tiga tahun;
 - Perkara perdata permohonan (*voluntary*), kecuali untuk permohonan kepailitan;
 - Perkara permohonan cerai dan biaya pemeliharaan anak pada peradilan agama, kecuali jika digabung dengan sengketa harta bawaan;
3. Alternatif 3: perlu dibuat aturan mengenai pembatasan perkara kasasi dengan model pendekatan kuantitatif bagi perkara sebagai berikut:
- Perkara sebagaimana disebutkan dalam alternatif 2 di atas; dan
 - Perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai perkara riil Rp.50.000.000 atau Rp.100.000.000,- kecuali jika perkara tersebut menyangkut asset utama bagi para pihak, antara lain:
 - a. Perkara sengketa tanah bagi petani penggarap;
 - b. Perkara PHK bagi buruh;
 - c. Perkara sengketa kredit bagi usaha kecil;
 - d. Perkara sengketa kapal bagi nelayan tradisional.

Terkait dengan pengaturan hukum pembatasan perkara ini, penulis kira perlu juga membahas sedikit mengenai kontradiksi di balik gagasan ini. Sebagian kalangan memang melihat gagasan pembatasan perkara sebagai suatu solusi, sementara sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu pelanggaran terhadap keadilan individu yang berarti pula mengesampingkan keadilan substansial. Penulis sendiri termasuk yang sepakat dengan pendapat pertama.

“Gagasan pembatasan perkara sebaiknya tidak dilihat sebagai suatu penyakit hukum yang bersifat teknologis (di mana pengadilan dalam memecahkan perkara lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang sifatnya teknis dan menjauh dari wacana moral, sehingga cenderung melahirkan keadilan formal atau keadilan yuridis ketimbang keadilan substansial). Tentu tidak demikian, kurang tepat kiranya jika kita melihat persoalan penumpukan perkara dengan orientasi wacana moral, sementara perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, memerlukan suatu pemecahan lewat aturan yang ada.”⁴³ Pembatasan perkara juga tidak melanggar keadilan substansial, upaya hukum banding tetap ada untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, yang seharusnya dipahami adalah “bahwa pengadilan kasasi bukanlah dibentuk untuk mengadili semua perkara, tugas MA secara historis ialah memastikan bahwa *its supremacy as the sole source of the law*”.⁴⁴

⁴³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hal. 3.

⁴⁴ Luhut M.P Pangaribuan, *Loc.Cit.*

Dengan berpikir seperti ini, maka seharusnya kita dapat lebih leluasa untuk menerapkan pembatasan perkara dengan cara membuat aturan-aturan hukum yang diperlukan. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, bahwa pembatasan perkara sebenarnya telah diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, namun demikian masih dibutuhkan penyempurnaan. Penyempurnaan dapat dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi, pemikiran, dan hasil riset yang telah dideskripsikan di atas. Penyempurnaan seyogyanya tidak hanya dilakukan terhadap revisi Pasal 45A atau tepatnya Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, melainkan juga peraturan hukum lain yang terkait dengan akses pengajuan upaya hukum kasasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan lain-lain.

Beban MA kini memang semakin berat dengan adanya kecenderungan peraturan undang-undang yang mem "by pass" peran pengadilan tingkat banding, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Umumnya pertimbangan untuk memotong tahapan beracara tersebut demi memastikan peradilan yang cepat, yang sebagian memang berhubungan erat dengan *nature* sengketa yang ada.⁴⁵ Namun kenyataannya hal tersebut tidak tercapai. Waktu penyelesaian malah semakin lama disebabkan persoalan menumpuknya perkara kasasi di MA.

Persoalan apakah putusan-putusan pengadilan tingkat pertama pada pengadilan niaga, pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan lain-lain perlu berujung di tingkat kasasi atau cukup di tingkat banding saja mungkin perlu kajian lebih mendalam lagi. Revisi terhadap undang-undang yang cukup banyak tersebut merupakan hal yang tidak mudah. Hal yang paling realistis saat ini adalah revisi terhadap Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 khususnya terkait pembatasan perkara kasasi pidana ringan, kasasi perkara perdata, dan *Perkara Kasasi Bidang Hukum Keluarga dan Waris* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

⁴⁵ Rifqi Sjarief Assegaf *at all*, *Op. cit.*, hal. 8.

Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Peradilan sederhana berarti cara pengadilan yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Dalam konteks ini, maka pembatasan perkara menjadikan perkara-perkara yang sederhana akan berhasil diselesaikan di pengadilan tingkat pertama atau paling jauh di pengadilan tingkat banding. Pembatasan perkara lebih menjamin kepastian hukum, dan tidak menyebabkan keengganan atau ketakutan pihak berperkara untuk beracara di muka pengadilan.

Peradilan cepat berarti penyelesaian perkara ditempuh dalam waktu yang tidak berlarut-larut. Pembatasan perkara diharapkan dapat menyelesaikan masalah tumpukan perkara di MA. Selesaiannya tumpukan perkara akan mengefektifkan penetapan waktu penyelesaian perkara kasasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua MA No.138/KMA/IX/2009 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI, yaitu selama setahun. Pembatasan perkara juga akan membuat penyelesaian perkara sederhana dengan lebih cepat, yaitu di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding, dimana masing-masing diselesaikan dalam waktu enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara.

Biaya ringan berarti dapat terpikul oleh rakyat. Pembatasan kasasi akan membuat perkara-perkara yang sederhana selesai paling jauh di tingkat banding. Hal ini berarti pihak yang bersengketa mengenai perkara sederhana tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya diatur bahwa "besarnya biaya kasasi perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)". Pembatasan seperti ini tentu akan mencegah terulangnya peristiwa perkara parkir bernilai Rp.1000,- dengan biaya perkara kasasi yang lima ratus kali lipatnya sebagaimana telah digambarkan sebelumnya. Biaya yang ringan akan menyebabkan pihak yang berkepentingan tidak enggan lagi untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan.

Penguatan pembatasan perkara seperti yang telah diuraikan di atas tadi, selain dapat mewujudkan peradilan yang cepat dan berbiaya ringan, namun juga akan membuat penyelesaian perkara kecil jadi lebih efektif dan efisien. Tanpa penumpukan perkara, diharapkan MA secara konsisten dapat menyelesaikan perkara kasasi setiap tahunnya dengan lebih konsentrasi dan penuh ketelitian, sehingga nantinya dapat menghasilkan putusan-putusan kasasi yang lebih baik dan berkualitas.

F. Penutup: Kesimpulan

Dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam hukum positif yang ada sekarang sebenarnya cukup menjamin asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, namun sayangnya tidak terimplementasi dengan baik, bahkan semakin terhambat dengan masalah tumpukan perkara di MA. Gagasan pembatasan perkara kasasi muncul untuk mengatasi permasalahan tumpukan perkara di MA, yang juga merupakan salah satu faktor penyebab belum terimplementasinya asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Perkara yang perlu dibatasi pengajuan kasasinya antara lain:

1. Perkara perdata:
 - a. Perkara yanguntutannya kecil “*Small Claim*” atau Perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai perkara riil Rp.50.000.000 atau Rp.100.000.000,- kecuali jika perkara tersebut menyangkut asset utama bagi para pihak, antara lain:
 - Perkara sengketa tanah bagi petani penggarap;
 - Perkara PHK bagi buruh;
 - Perkara sengketa kredit bagi usaha kecil;
 - Perkara sengketa kapal bagi nelayan tradisional
 - b. Perkara perdata permohonan (voluntary), kecuali untuk permohonan kepailitan;
2. Perkara pidana:
 - a. kasasi atas putusan bebas,
 - b. kasasi bagi perkara pidana ringan (ancaman hukumannya ringan antara satu atau tiga tahun), termasuk pula yang putusan pidananya berupa denda atau ancaman pidana pelanggaran.
3. Kasasi atas perkara perkawinan (Perkara permohonan cerai dan biaya pemeliharaan anak pada peradilan agama, kecuali jika digabung dengan sengketa harta bawaan). Dan perkara-perkara adat untuk lingkup hukum keluarga; dan
4. Perkara kasasi Hubungan Industrial.

Pengaturan hukum pembatasan kasasi diwujudkan dengan melakukan penyempurnaan yang seyogyanya tidak hanya dilakukan terhadap revisi Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, melainkan juga peraturan hukum lain yang terkait dengan akses pengajuan upaya hukum kasasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan lain-lain.

Penyempurnaan aturan pembatasan perkara, berimplikasi pada banyaknya perkara yang akan berakhir di tingkat banding, dengan begini selain rentang waktu proses penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, biaya yang dikeluarkan pihak berperkara juga otomatis menjadi lebih ringan. Jika semua ini dapat diterapkan, maka asas penyelesaian yang cepat dan berbiaya ringan barulah dapat terwujud.

Selain itu, penyempurnaan aturan pembatasan perkara juga membuat penyelesaian perkara kecil jadi lebih efektif dan efisien. Tanpa penumpukan perkara, diharapkan Mahkamah Agung secara konsisten dapat menyelesaikan perkara kasasi setiap tahunnya dengan lebih konsentrasi dan penuh ketelitian, sehingga nantinya dapat menghasilkan putusan-putusan kasasi yang lebih baik dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Assegaf Rifqi Sjarief *at all*, Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2010
- Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Garafika, 2009
- Harahap M. Yahya, Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- , Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Marpaung Leden, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Mulyadi Lilik, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2007
- Pangaribuan Luhut M.P, Pembatasan Perkara Kasasi Dalam Rangka Menjaga Kesatuan Hukum: Satu Catatan Hukum Dalam Prospeksi: Makalah disampaikan pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Insdependensi Peradilan (LeIP) dan *Netherland Legal Reform Program* (NLRP) di Jakarta 20 Juli 2010.
- Rosita Dian, Pentingkah Pembatasan Perkara, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2010
- Soedirjo, Kasasi dalam Perkara Perdata, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Suhadi, Bahan Presentasi: Pembatasan Upaya Hukum untuk Menjaga Kesatuan Hukum, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010
- Sulistyo, Tesis: Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat Untuk Peradilan Tata Usaha Negara Studi Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007
- Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Widya Padjajaran, 2009

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Konsep Ideal Peradilan Indonesia, Jakarta: LeIP dengan dukungan National Legal Reform Program (NLRP), 2010

Peraturan perundang-undangan dan Dokumen Hukum:

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357K/Pdt/2005

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022K/PDT/2006

Internet

http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_delayed_is_justice_denied, diakses tanggal 10 Mei 2011.

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/08/09/brk,20040809-28,id.html>, diakses tanggal 10 Mei 2011

Lain-lain

Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Tahun 2003.

—————, Naskah Akademis Pembatasan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2004.